

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengenai Peran Bangkesbandpoldari NTB dalam mensukseskan Pilkada NTB Tahun 2018, Penyusun berkesimpulan :

1. Bakesbangpoldagri NTB telah melakukan Kordinasi dalam dalam rangka penyelenggaraan pilkada (TNI, atau POLRI) dalam rangka dukungan keamanan proses pilkada. Melakukan pemantuan pelaksanaan pilkada, memberikan saran dalam penyelesaian masalah pilkada kepada Gubernur. Penciptaan kondusipitas daerah sama pelaksanaan pilkada 2018, sosialisasi pilkada dalam rangka membantu KPU. Melakukan pendidikan politik juga lebih penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pemilu/pilkada.
2. Suksesi Bakesbangpoldagri NTB pada Pilkada di NTB Tahun 2018 ialah dengan menekan Angka Kasus Pilkada NTB 2018, pemberian pemahaman, keyakinan dan Kepercayaan Politik pada masyarakat, meningkatkan kemampuan anggota jejaring Kominda kabupaten/kota, melakukan deteksi dini dan cegah dini dalam pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal serta penanganan konflik, kegiatan rakor stabilitas Polkam, pengkajian masalah strategis di kab/kota Se NTB, Penguatan Kapasitas Forum Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) menjelang Pilkada 2018. Sedangkan disisi lain,

kendala yang dihadapi, diantaranya terbatasnya anggaran yang tersedia di Baksebangpol NTB hingga terbatas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jumlah sumber daya manusia belum memadai dengan rasio wilayah kerja yang luas, jarak tempuh yang sulit dijangkau terutama di pedalaman. Kultur budaya masyarakat NTB yang majemuk dan adanya dua pulau di provinsi NTB. Sering terjadinya manipolitik dan pendukung calon. Indeks demokrasi masyarakat NTB masih kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti ini merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan Peran bangkesbanpoldagri NTB dalam mensukseskan Pilkada di NTB di masa yang akan datang.
2. Di harapkan kepada Pemerintah provinsi khususnya di seluruh SKPD NTB untuk mengoptimalisasi program-program penguatan mengenai Pilkada yang damai dan sehat serta menjaga keamanan di wilayah hukum NTB. Dan tetap atensi koordinasi dalam mensukseskan Pilkada di NTB di masa yang akan datang.
3. Di harapkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperhatikan kebutuhan anggaran dengan alokasi wilayah kerja yang sangat jauh dengan ibu kota pemerintah provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abu Ahmadi. 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu.

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta:Prisma Media.

Arifin Rahman, 2002, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, Surabaya:SIC.

Arbi Sanit, 1997, *Partai, pemilu dan demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____ 1985, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Prihatmoko, J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang : LP2I.

Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Samuel P. Huntington dan John Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto,1987-2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Garafindo Persada.

Suharizal, 2012, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan-Undangan :

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002.

Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Jakarta 15 Januari 2011.

Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Jakarta 11 Mei 2012.

Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jurnal / Artikel/Laporan :

Wahyu Nugroho, 2016, "*Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilukada di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

Yusdianto, 2010, "*Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*", Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Laporan, Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Lintas Tokoh pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tanggal 09 s.d 10 februari 2018.

Laporan, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pilkada/Pilpres/Pileg Kepada Toko Ormas/Orpol pada Bakesbangpoldagri Provinsi NTB Tanggal 25 S.d 26 MARET 2018.

Rencana Kerja Strategis Bakesbangpoldagri NTB 2013-2018

Review Rencana strategi Bakesbangpoldagri NTB 2013-2018

Internet :

<http://okberita.com/2018/01/24/pengamat>, *Pilkada dan wujud demokrasi di-tingkat lokal*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 23.20 WIB.

sumber:<http://repository.usu.ac.id> *Strategi Partai Politik Memenangkan Pemilu*, diakses tanggal 28 Maret 2018, pukul 12:23 wib).

<https://jagokata.com/arti-kata/suksesi.html>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 23.20 WIB.

Elfis, Suksesi Pegetasi Hutan Rawa Gambut Provinsi Riau, elvisuer.Blokspot.Com/2010/06/suksesi-pegetasi-hutan-rawa-gambut.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 23.20 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



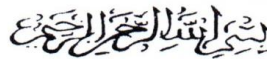
Nama : Rahmad Hidayat
Tempat, Tanggal lahir : Bantulanteh, 30 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama Status : Islam
Alamat : Desa Bantu Lanteh, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa
No. Tlp/Hp : 082339023400
Email : kopitumbuk3@gmail.com

Pendidikan formal
Tahun 2021 – Sekarng : Unviersitas Muhammadiyah Mataram
Tahun 2012-2015 : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tarano
Tahun 2009-2012 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarano
Tahun 2003-2009 : Sekolah Dasar Negeri Bantulanteh

Lampiran 2 Surat Pengantar Izin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI "B"
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723



Nomor : 473/II.3.AU/F/XII/2020
Lamp. : Proposal Skripsi
Hal : *Mohon Izin Penelitian*

Mataram, 19 Rabiul Akhir 1442 H
04 Desember 2020 M

Kepada Yth : **Kepala BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi NTB**

di –

Mataram

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ba'da salam, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, Amin.

Dalam rangka menyelesaikan syarat-syarat untuk mencapai kebulatan studi program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, maka para mahasiswa harus memenuhi Karya Ilmiah (Skripsi), untuk keperluan tersebut kami mohonkan izin bagi mahasiswa berikut:

1. Nama : **RAHMAD HIDAYAT**
2. N I M : 216130024
3. Jurusan : Sosial
4. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
5. Tujuan : Untuk Memperoleh Data
6. Tema / Judul : **"Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilu pada Tahun 2018"**
7. Lokasi Penelitian : BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi NTB

Demikian atas bantuan dan rekomendasi/izin bagi mahasiswa yang bersangkutan, kami khaturkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Dr. H. Muhammad Ali. M.Si.
NIDN.0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Rektor UMMAT (untuk maklum);
- 2 Saudara mahasiswa yang bersangkutan;
- 3 Arsip.

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 934 / XII / R / BKBDN / 2020

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Nomor : 473/II.3.AU/F/XII/2020
Tanggal : 04 Desember 2020
Perihal : Mohon Izin Penelitian
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **RAHMAD HIDAYAT**
Alamat : Dusun Bantu, RT. 002 RW. 004 Kel/ Desa Batulanteh Kec. Tarang Kab. Sumbawa No Identitas, 5204253005950001, No tlpn. 082339023400
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Bidang/Judul : **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILUKADA TAHUN 2018**
Lokasi : Bakesbangpoldagri Prov. NTB
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
Lamanya : Desember 2020 - Januari 2021
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. **Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Mataram
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Prov. NTB di Tempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

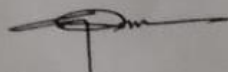
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi

1. Kartu Konsultasi Pembimbing Pertama

KARTU BIMBINGAN SIKRIPSI		
Form A	KARTU BIMBINGAN SIKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2019-2020 <u>PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN</u>	Pas Photo 3x4
Nama Mahasiswa	: RAHMAD HIDAYAT	
Program Studi	: ILMU PEMERINTAHAN	
NIM	: 216130024	
Judul	: Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Baarat Dalam Mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018	
Pembimbing I	: Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si	
KEGIATAN BIMBINGAN PROPOSAL		
Tanggal Bimbingan	Kegiatan	Paraf Pembimbing
18/01/2021	Bab IV dan Bab V	
20/01/2021	ACU	

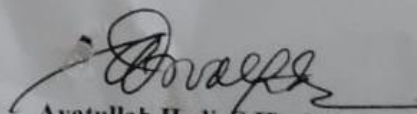
Mengetahui,

Dosen Pembimbing I







Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN.0825038303

Ketua Program Studi Pemerintahan



Avatullah Hadi, S.IP., M.Ip
NIDN.0816057902

2. Kartu Konsultasi Pembimbing Pertama

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Form A</div> <div style="text-align: center;"> KARTU BIMBINGAN SKRIPSI KARTU BIMBINGAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2020-2021 <u>PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Pas Photo</div> </div>		
Nama Mahasiswa : RAHMAD HIDAYAT Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN NIM : 216130024 Judul : Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Pembimbing II : Hidayatullah, S.Ip., M.Ip		
KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI		
Tanggal Bimbingan	Kegiatan	Paraf Pembimbing
1/01/2021	Perbaiki kesimpulan	
4/01/2021	Jangan menggunakan Teori	
6/01/2021	harus faktor dan hasil penelitian tidak SPaen 2	
	Ace. Ace. ke pem 1.	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing II



Hidayatullah, S.Ip., M.Ip
NIDN. 0809038902

Ketua Program Studi Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip
NIDN.0816057902

**REKAPITULASI KASUS KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2018
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	KABUPATEN/KOTA	LATAR BELAKANG KONFLIK							Jumlah Kasus	KET
		IDILOGI	POLITIK	EKONOMI	SOSIAL	BUDAYA	HANKAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Kota Mataram	-	-	-	2	-	-	1	Vertikal : 2	
2.	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	Horizontal : 11	
3.	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	1	-	-	1		
4.	Kab. Lombok Timur	1	1	2	-	-	-	4	<i>Sumber :</i> Komunitas Jejaring Kab/Kota Se NTB	
5.	Kab. Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Kab. Sumbawa	-	-	-	1	-	-	1		
8.	Kab. Dompu	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Kab. Bima	-	-	1	2	-	-	3		
10.	Kota Bima	-	-	-	2	-	-	2		
	Jumlah.....	1	1	3	8	-	-	13		

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
Sekretaris,

ttd

Drs. H. KATARUDDIN, MH
NIP. 19611231 198503 1 175

Actin
Go to

Lampiran 5 Data Konflik

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Tahunan 2018

Lampiran : PK

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PEMERINTAH PROVINSI NTB**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib	1. Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan	5000 Orang
2.	Berkurangnya konflik sosial	2. Penurunan jumlah konflik sosial	27 Kasus
3.	Terminimalisirnya paham radikal di masyarakat	3. Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme	5000 Orang
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik	73%
5.	Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	5. Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat	20 Kelompok Masyarakat (Pokmas)
6.	Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	6. Jumlah Ormas yang terbina	100 Ormas

NO.	ANGGARAN	KETERANGAN
I. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 3.602.857.320	Sumber Dana APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1 s/d 3; IKU No. 1; IK Renstra No. 2 dan 3; IK RPJMD No 1
II. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 902.568.300	Sumber Dana APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1 s/d 5; IKU No. 1 dan 2; IK Renstra No. 1 s/d 5; IK RPJMD No. 1 dan 3
III. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Rp. 76.547.500	Sumber Dana APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1, 2, 3 dan 5; IKU No. 1; IK Renstra No. 2 dan 3; IK RPJMD No. 1
IV. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.382.450.000	Sumber Dana APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 4 dan 6; IKU No. 2; IK Renstra No. 4 dan 6; IK RPJMD No. 3

Mataram, November 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Dr. H. LALU SYAFTI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19611231 198203 1 440

Lampiran 7 Lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan 2018



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Pendidikan No. 2 Mataram Kode Pos : 83125
Telepon (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Lalu Syafi'i, MM
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Mataram, 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI NTB,

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM
Pembina Utama Madya

LAPORAN PENDUKUNG LKJIP/LAKIP 2018

a. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	TARGET/ANGGARAN (Rp.)				% CAPAIAN		FISIK %		
		TH 2017	TH 2018	TH 2017	TH 2018			TH 2017	TH 2018	TH 2017	TH 2018					
1	2	3	4	5	6	7 = 5-3x100%	8 = 6-4x100%	9	10	11	12	13	14 = 12-10x100%	15 = 13-11x100%	16	
1 Berkurangnya konflik sosial	Penurunan jumlah konflik sosial	32	27	21	13	66,63%	48,16% Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.105.794.300	4.038.897.320	6.018.864.731	3.947.034.804	98,57%	97,73%	99,67	
2 Teminalaksimanya paham radikal di masyarakat	Masyarakat yang tersosialisasikan paham radikalisme	-	5000	-	12.708	-	254,18%	254,18%								
3 Temwujudnya masyarakat yang terdid	Jumlah masyarakat yang tersosialisasikan wawasan kebangsaan		5000		12.708		254,18%	254,18%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.037.275.000	1.017.125.800	1.942.871.435	1.015.747.354	96,37%	99,86%	100,00
4 Teregah semakin meklusnya 4 penyebanan dan penggunaan narkotika	Masyarakat yang tersosialisasikan pemberantasan penyakit masyarakat		20		20		100,00%	100,00%	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	153.100.000	78.547.500	151.829.700	73.357.500	99,17%	95,83%	100,00
5 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik		73		75,12		102,90%	102,90%	Program Pendidikan politik masyarakat	1.598.985.100	1.744.160.000	1.594.570.030	1.743.886.882	99,74%	99,98%	100,00
6 Temwujudnya organisasi 6 masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Jumlah Omgas yang terhdna		100		122		122,00%	122,00%								

* Kasus yang dimaksud diatas adalah kasus skala provinsi sesuai UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian

**Wawancara bersama Bpk. I Made Adi Kertawijaya, S.IP
Kepala Subbidang Fasilitas kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan
Partai Politik pada bidang Politik dalam negeri**



**Wawancara bersama Ibu Nani Mariani Wahyu, SE. selaku pengumpulan
dan pengelolaan Data (Subbag Pendidikan Politik dan Peningkatan
Organisasi pada bidang Politik dalam Negeri**



Wawancara bersama Bpk Masdianto, S. Selaku Pengabdian Administrasi Subbidang Fasilitas kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik pada bidang Politik dalam negeri

